

PEMIKIRAN DAN TINDAKAN POLITIK HASAN TIRO

Oleh:

Abrar Muhammad Yus

Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: bangbai85@gmail.com

Abstrak

Pergolakan politik rakyat Aceh pada dasarnya bersifat kesinambungan perjuangan politik bagi rakyat dan bangsa Aceh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tokoh-tokoh pejuang politik Aceh yang lahir dan dikenal kegigihannya dalam memperjuangkan ide-ide perjuangannya. Untuk melakukan kajian terhadap tokoh-tokoh tersebut, dapat dilihat dari pendekatan ataupun pola serta periode perjuangan politik yang dilakukan oleh para tokoh tersebut. Hasan Tiro sebagai tokoh “pejuang-politik” disamping itu ia juga sebagai “pemikir- pejuang” misalnya, secara umum dapat dilihat dalam tiga periode perjuangannya yaitu: *pertama*, periode ketika ia masih muda dan sekaligus sebagai penerus perjuangan Tgk. Daud Beureueh, *kedua*, periode ketika mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan *ketiga*, periode penyesuaian perjuangan politik yang dalam periode ini Hasan Tiro mengalami pergeseran nilai ide-ide perjuangan politiknya, dari semangat nilai-nilai keagamaan berubah kearah yang kecenderungannya bersifat “sekuler”. Hal ini dapat dilihat dari perubahan tujuan perjuangan Hasan Tiro, serta pola perjuangan politiknya yang pada akhirnya harus berakhir di meja perundingan Helsinki.

Kata Kunci: pemikiran politik, hasan tiro

A. Sketsa Sosial-Politik Hasan Tiro

Sejarah mencatat bahwa rakyat Aceh tidak dapat ditaklukkan oleh Belanda dengan cara yang militeristik, karena perang terhadap Belanda dalam pandangan rakyat Aceh merupakan perang suci “*jihad fisabilillah*,” yang bermakna jika mati akan disebut *syahid* karena didorong oleh semangat *aqidah Islamiyah*, yang sudah mengakar sangat kuat dalam pemahaman rakyat Aceh. Oleh karena itu, perang ini telah melibatkan semua lapisan masyarakat tidak terkecuali siapapun bahkan kaum perempuan sekalipun. Para ulama berperan penting dalam mengobarkan semangat *jihad* dalam perang tersebut. Seperti Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman telah memimpin sebuah peperangan yang diikuti oleh bangsa Aceh serta sanak keluarganya di Tiro, bahkan sampai kepada Teungku Chik Maat di Tiro yang *syahid* dalam suatu peperangan di Alue Bhot, Pidie, pada tahun 1911.¹

Perpaduan antara agama dan cinta tanah air, serta adanya keinginan yang kuat untuk merdeka telah tertanam di dalam setiap jiwa rakyat Aceh yang dimulai sejak adanya perlawanan terhadap penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang yang telah menjadi semangat bagi rakyat Aceh dalam upaya mengusir penjajahan.² Dengan demikian, Aceh merupakan

¹ Yusra Habib Abdul Ghani, *Mengapa Sumatera Mengugat*, (Jakarta: Biro Penerangan Acheh-Sumatera National Liberation Front, 2000), hal. 34.

² Munawar Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009), hal. 7.

termasuk wilayah terakhir yang dimasukkan ke dalam pemerintahan Belanda. Tetapi Aceh juga termasuk wilayah yang pertama keluar dari kekuasaan Belanda.³

Aceh dapat dikategorikan sebagai wilayah yang tidak lepas dari konflik. Setelah kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat (Indonesia) pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tgk. Daud Beureueh di proklamirkan pada 1953.⁴ Pemberontakan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang memasukkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, dan sekaligus dihapusnya hak istimewa bagi rakyat Aceh untuk menjalankan *Syari'at Islam* dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk pengingkaran Jakarta terhadap sumbangsih rakyat Aceh dalam perang kemerdekaan, sehingga mendorong munculnya gerakan perlawanan. Konflik ini akhirnya berhenti, dan Aceh diberikan keistimewaan yaitu berupa otonomi luas dalam bidang agama, adat-istiadat, dan pendidikan.⁵

Para tokoh pejuang DI/TII bersepakat untuk kembali membangun serta menggalang suatu sikap oposisi terhadap pemerintah pusat yang dikendalikan dan dipimpin oleh rezim Orde Baru Soeharto, Soekarno dan Soeharto sebenarnya bagi mereka tidak ada bedanya. Sehingga dalam suatu pertemuan pada tahun 1972 segenap rakyat Aceh diputuskan untuk kembali berjihad, yaitu upaya untuk memerdekakan bangsa Aceh dari pemerintah Indonesia dan membangun negara Aceh yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.⁶

Dapat diketahui sebenarnya bahwa kreator sesungguhnya Gerakan Aceh Merdeka adalah Tgk. Daud Beureueh, ia dikenal masyarakat luas bahkan banyak mempunyai kader dan salah satunya adalah Hasan Tiro yang ketika itu diberikan tugas khusus untuk menangani masalah luar negeri terutama dalam hal lobi dunia internasional dan persenjataan.⁷ Dalam mewujudkan kemerdekaan Aceh tersebut diperlukan adanya kekuatan persenjataan yang memadai, oleh karena itu Daud Beureueh mengutus abang Hasan Tiro yaitu Zainal Abidin Tiro ke Amerika untuk menemui adiknya serta membicarakan mengenai persenjataan tersebut, dan Hasan Tiro menyanggupinya untuk menyiapkan persenjataan yang dibutuhkan.⁸ Tetapi pada akhirnya persenjataan tersebut tidak pernah dikirimkan ke Aceh, bahkan Daud Beureueh tetap berupaya dengan mengirimkan kembali beberapa utusan untuk menjumpai Hasan Tiro.⁹

Pada awalnya Hasan Tiro menginginkan Aceh sebagai bagian dari negara federal Indonesia. Keinginan tersebut gagal sehingga Hasan Tiro mengubah strategi perjuangannya yaitu dari *inter-cultural nationalism* menjadi *ethno-regional*, yang merupakan nasionalisme yang terpisah dari Indonesia dan diartikan sebagai nasionalisme Aceh. Oleh sebab itu,

³ Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hal. 151.

⁴ A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 124.

⁵ Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI, 2003), hal. 22.

⁶ Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014), hal. 46.

⁷ Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka*, (Titian Ilmu Insani, 2000), hal. 16.

⁸ Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh...*, hal. 46.

⁹ Lihat: Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik...*, hal. 17-19.

pelestarian ideologi tersebut diformulasikan ke dalam sebuah alat perjuangan yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mencita-citakan kemerdekaan secara kewilayahan serta ekonomi dan politik yang dilandasi oleh semangat kebesaran sejarah di masa lalu dalam konteks negara Aceh yang merdeka dan yang berkedaulatan rakyat.

Gerakan nasionalis Aceh yang dipelopori oleh Hasan Tiro tersebut tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 1976 atau tahun 1980-an. Akar penyebabnya adalah persoalan ekonomi dan politik, tetapi keduanya berkombinasi dengan aspirasi, ideologi, kekecewaan, ambisi, serta kepentingan. Eksploitasi ekonomi dan politik bukan hanya terjadi pada masa Orde Baru, tetapi sudah dimulai sejak Belanda mengintegrasikan kesultanan Aceh ke dalam lingkungan politik nasional yang berpusat di Batavia. Kondisi ini berlangsung secara terus-menerus kecuali sekitar 5 tahun pada masa revolusi setelah Indonesia merdeka. Namun menjadi intensif kembali pada masa pemerintahan Soeharto, tepatnya ketika modal asing banyak mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam Aceh. Tetapi Aceh sendiri tetap miskin, terkebelakangan, dan terampas hak-haknya sehingga terciptanya kelompok yang tertindas.¹⁰

Setelah sempat mengalami masa damai, konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat kembali terjadi yaitu ketika Hasan Tiro memproklamkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976.¹¹ Gerakan ini pada awalnya hanya dianggap sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang tidak mempunyai dampak terhadap stabilitas keamanan dan politik, tetapi pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan melalui Operasi Jaring Merah dalam kurun waktu 1989-1998, sehingga Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) yang kemudian menimbulkan konflik kekerasan yang berkepanjangan.

Perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia yang telah dimulai sejak 1953 (DI/TII) dan tahun 1976 (GAM) itu, terdapat perbedaan cara perjuangan dalam kedua bentuk gerakan tersebut. DI/TII berdasarkan Islam sedangkan GAM lebih mengarah kepada nasionalisme Aceh. Gerakan DI/TII dapat digolongkan kepada gerakan yang tidak ingin memisahkan Aceh dari Indonesia, sementara GAM dianggap sebagai gerakan separatisme. Kendatipun demikian, jika dikaji secara mendalam kedua bentuk gerakan tersebut yaitu dari tahun 1953 sampai gerakan tahun 1976 unsur kekerasan yang menimpa rakyat Aceh merupakan indikasi utama dan berkesinambungan.¹²

Berbeda dengan DI/TII, deklarasi gerakan kemerdekaan Aceh sama sekali tidak menyinggung isu agama dan cenderung sekuler (*secular in nature*). Walaupun dalam berbagai dokumen tertulis maupun pernyataan-pernyataan lainnya, al-Qur'an disebutkan sebagai konstitusi negara tetapi penyebutan ini hanya bersifat insidental. Bahkan di masa 1980-an di mana GAM kembali muncul, dan isu mendirikan negara Islam sudah lebih eksplisit dinyatakan, tetapi tetap saja isu utama GAM adalah melawan kolonialisme

¹⁰ Asvi Warman Adam, "Konflik dan Penyelesaian Aceh: Dari Masa ke Masa", dalam *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*, ed., M. Hamdan Basyar, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008), hal. 4-5.

¹¹ M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hal. 26-27.

¹² Asvi Warman Adam, *Konflik dan Penyelesaian ...*, hal. 21.

Indonesia-Jawa yang dianggap telah merampas dan menduduki wilayah tanah air dan kekayaan alam Aceh.¹³

Kelahiran GAM sendiri sejak awalnya memang telah diwarnai dengan nuansa perbedaan dan perpecahan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara tokoh tua dan tokoh muda dalam organisasi gerakan tersebut. Sebagian besar tokoh tua menginginkan garis perjuangan GAM berazaskan Islam, dengan alasan bahwa hal itu sesuai dengan sejarah masuknya Islam ke Aceh dan kejayaan kerajaan Islam Aceh Darussalam. Juga dengan alasan bahwa para tokoh tua GAM adalah tokoh-tokoh DI/TII yang sebelumnya sangat konsisten dengan garis perjuangannya. Sedangkan kelompok muda GAM yang dimotori oleh Hasan Tiro menginginkan GAM menjadi organisasi yang modern dan sekuler. Hal ini dimaksudkan agar GAM dapat diterima dan mendapat dukungan dari dunia internasional.¹⁴

Di samping itu, hal lain yang membuat perbedaan semakin tajam adalah keinginan Hasan Tiro yang menghendaki bentuk sistem negara Aceh Merdeka nantinya adalah sebuah kerajaan atau monarki. Hal ini sangat bertentangan dengan sistem negara yang diinginkan oleh kelompok tua yang menghendaki lahirnya kembali Republik Islam Aceh (RIA) sebagaimana yang telah diperjuangkan dan diproklamirkan oleh Tgk. Daud Beureueh sebelumnya.¹⁵

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, pada tahun 1974 (sebelum deklarasi GAM) Hasan Tiro menyempatkan waktunya untuk mengunjungi kampung halamannya (Aceh) dan bertemu dengan Gubernur Aceh yang dijabat oleh Muzakkir Walad. Hasan Tiro meminta kepada Gubernur Aceh untuk mengelola sumber daya alam Aceh melalui perusahaan miliknya, terutama terkait pembangunan tambang gas Arun di Lhokseumawe. Tetapi permintaannya tersebut tidak disetujui, karena menurut Muzakkir Walad selaku pimpinan kepala daerah saat itu mengatakan bahwa seluruh kontraktor Arun ditentukan oleh pemerintah pusat. Meskipun sebenarnya pada waktu itu telah ada kontraktor lain di Arun dari perusahaan Amerika, yaitu Bechtel Inc dari California.¹⁶

Penolakan tersebut kemungkinan membuat Hasan Tiro marah terhadap pemerintah Indonesia, dan hal inilah yang menjadikannya bukti dasar bahwa Aceh hanya dijadikan ladang eksploitasi ekonomi bagi pemerintah pusat saja. Menurut Fauzi Hasbi Geudong, ada satu perintah penting dari Hasan Tiro yaitu upaya pembunuhan terhadap warga Amerika yang ada di Lhokseumawe terutama yang bekerja di proyek-proyek vital.¹⁷ Dengan demikian, kehadiran Hasan Tiro di Aceh untuk memimpin secara langsung upaya perlawanan tersebut terhadap pemerintah Indonesia telah mampu memberikan semangat bagi para pejuang Aceh untuk melakukan upaya-upaya perlawanan. Hal ini dapat dilihat dari upaya perlawanan yang

¹³ Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, (Jakarta: FES, 2010), hal. 33.

¹⁴ Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh...*, hal. 50-51.

¹⁵ Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh...*, hal. 51.

¹⁶ Muhammad Madya Akbar, *Aceh Meretas Jalan Damai Menuju Masa Depan*, (Jakarta: Publisher Lentera Demokrasi, 2009), hal. 52.

¹⁷ Operasi tersebut tidak disetujui oleh Hasbi Geudong dan Ilyas Leubee. Mereka berpendapat bahwa haram hukumnya membunuh walaupun orang tersebut bukan beragama Islam, apalagi mereka tidak mengganggu pergerakan. Lihat: Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik...*, hal. 38-40.

sangat agresif di tahun 1977 (setahun setelah deklarasi GAM). Serangan demi serangan pun kerap terjadi, terutama terhadap militer Indonesia dan warga asing yang bekerja di proyek-proyek vital Lhokseumawe. Korban pun berjatuhan, di antaranya dua warga asing yang berkebangsaan Amerika.¹⁸

Dalam sebuah peristiwa menarik dapat dicermati pula bahwa, ketika itu Hasan Tiro hampir saja menghampiri maut, tatkala pesawatnya nyaris terjadi kecelakaan di celah gurun dan pegunungan di Amerika. Ia dan rekan bisnisnya terbang dengan menggunakan jet pribadi berkursi empat. Ketika hendak melewati puncak Mount Rainer di tenggara Seattle, sebuah gunung tertinggi di Washington dengan ketinggian 14.400 kaki, tiba-tiba saja mesin jet pesawat mendadak mati. Hasan Tiro terbang melayang dengan nasib yang tak pasti, antara hidup dan mati. Pada saat itu pula ia berjanji, jika tuhan memberikannya tetap hidup, ia akan mengabdikan sisa umurnya bagi Aceh. Dan akhirnya pesawat mendarat dengan selamat berkat kepiawaian pilot.¹⁹

Dalam konteks gerakan perlawanan rakyat Aceh (GAM) yang diproklamkan oleh Hasan Tiro tersebut, pihak militer pemerintah Indonesia (TNI) tidak tinggal diam, mereka melakukan upaya tekanan-tekanan tertentu terhadap pengikut GAM. Dengan melihat gencarnya tekanan TNI kepada pengikut GAM tersebut, maka di awal tahun 1979 Hasan Tiro mencoba meyakinkan pengikutnya dengan cara meminta pengertian dari wakilnya Muchtar Hasbi untuk diizinkan pergi ke luar negeri dengan alasan untuk mencari bantuan persenjataan serta dukungan internasional. Semula Muchtar Hasbi berat untuk mengizinkan kepergian Hasan Tiro, apalagi situasi dan kondisi para pejuang GAM sedang menghadapi tekanan TNI yang sudah tentu sangat dibutuhkan keberadaan pemimpin mereka di Aceh. Tetapi, setelah meyakinkan Muchtar Hasbi bahwa kepergiannya ke luar negeri tidak akan lebih dari tiga bulan dan akan kembali dengan membawa sejumlah alat persenjataan, maka akhirnya Hasan Tiro diizinkan untuk meninggalkan Aceh.²⁰

Pada tanggal 29 Maret 1979 dengan menggunakan perahu nelayan, Hasan Tiro bersama beberapa pengikutnya resmi meninggalkan Aceh. Menyeberangi Selat Malaka menuju Malaysia²¹, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya menuju ke Swedia dan menetap di sana hingga terwujudnya perdamaian di Aceh. Sementara janjinya untuk kembali dalam tempo tiga bulan dengan membawa bantuan persenjataan tidak pernah terealisasi.²²

Akibat minimnya persenjataan yang mereka miliki tentu tidak sebanding dengan gencarnya tekanan pihak TNI yang memiliki persenjataan lengkap mengincar mereka. Hal ini menyebabkan satu persatu tokoh elit Aceh Merdeka dapat dilumpuhkan. Dr. Muchtar Yahya Hasbi selaku Wakil Wali Negara Aceh Merdeka adalah tokoh pertama yang berhasil dilumpuhkan TNI. Ia tewas dalam sebuah penyerangan TNI di Kuala Simpang menjelang Idul Fitri tahun 1980. Kemudian sesudahnya menyusul Menteri Sosial Zubair Mahmud juga tewas dalam sebuah penyerbuan di daerah lain. Panglima II GAM wilayah Pase, Ismail Ben

¹⁸ Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh...*, hal. 58.

¹⁹ Nezar Patria, "Obituari: Perginya Sang 'Wali' Terakhir", dalam *Hasan Tiro The Unfinished Story of Aceh*, (Peny.), Husaini Nurdin, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010), hal. 2.

²⁰ Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh...*, hal. 58-59.

²¹ Lihat: *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro*, (National Liberation Front of Aceh Sumatra, 1984), hal. 222-225.

²² Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh...*, hal. 59.

juga tewas setelah terlebih dahulu ditangkap dan mengalami penyiksaan. Sementara itu, Ilyas Leubee Ketua Dewan Syura Aceh Merdeka dan tokoh senior Darul Islam tewas ketika sedang melaksanakan shalat Ashar dalam sebuah penyerangan. Seorang pengawalnya Idris Ahmad yang berusaha melindungi Ilyas juga ikut terbunuh dalam operasi tersebut.²³

B. Mengenal Hasan Tiro

a. Latar Belakang Keluarga

Hasan Muhammad Tiro atau yang lebih akrab disapa Hasan Tiro lahir pada 25 September tahun 1925 di desa Tanjong Bungong Kecamatan Kota Bakti Kabupaten Pidie. Ayahnya bernama Muhammad Leube dan ibunya bernama Fatimah binti Mahyiddin bin Muhammad Saman bin Abdullah.²⁴ Keluarga ulama Tiro mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Perang Aceh. Tiro sebenarnya merupakan nama salah satu daerah di Pidie. Tiro adalah tempat ulama menetap, ulama-ulama Tiro merupakan keturunan seorang haji dari Banten yang dahulu bermukim di Pidie.²⁵

Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman sendiri adalah seorang ulama dan sekaligus pemimpin perlawanan yang ambil bagian dalam perang Aceh pada periode 1885-1891. Setelah ia gugur, putranya Teungku Muhammad Amin melanjutkan perlawanan hingga tahun 1896. Tujuh orang putera, menantu dan cucu Teungku Muhammad Saman yaitu Teungku Maad Tiro merupakan yang terakhir gugur dalam pertempuran pada tanggal 3 Desember 1911 di Tangse.²⁶ Dengan demikian keturunan Teungku Muhammad Saman yang selamat adalah anak-anak perempuan atau cucunya yang masih di bawah umur termasuk Teungku Umar Tiro (1904-1980).²⁷ Hasan Tiro memiliki saudara laki-laki yaitu Teungku Zainal Abidin Tiro (1920-1980).

b. Latar Belakang Pendidikan

Awal pendidikan formalnya pada tahun 1943 di Madrasah Islam Sa'adah al-Abadiyah Blang Paseh yang diketuai oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Kemudian ia pindah dan melanjutkan pendidikannya pada masa pendudukan Jepang di Madrasah Islam Bireuen yang diketuai oleh Muhammad Nur el-Ibrahimi. Salah satu alasan kepindahannya adalah karena ia berselisih paham dengan temannya Teungku Ismail Paya Bujok. Di Madrasah inilah ia menyelesaikan pendidikannya pada tingkat menengah. Hasan Tiro termasuk salah seorang murid yang pintar, kepintarannya itu mendapat perhatian khusus dari sejumlah gurunya.²⁸

Salah seorang guru yang dekat dengannya ialah Muhammad Nur el-Ibrahimi, dalam berbagai kesempatan gurunya ini selalu mengajarkan berbagai ilmu, baik agama, ekonomi,

²³ Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh...*, hal. 59-60.

²⁴ Lukman Thaib, *Aceh's Case: A Historical Study of The National Movement for The Independence of Aceh-Sumatera*, (Malaysia: University of Malaya Press, 2002), hal. 259.

²⁵ H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982), terj. Firdaus Burhan, hal. 16.

²⁶ Lihat: *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro*, (ASNLF, 1984), hal. 115.

²⁷ M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan ...*, hal. 11.

²⁸ Munawar Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis, Yuridis ...*, hal. 10-11.

maupun politik. Pendidikan yang diperoleh Hasan Tiro baik di madrasah maupun dari gurunya secara langsung telah memberikan pemahaman awalnya tentang nasionalisme. Hal ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh Aceh yang mendukung kemerdekaan Indonesia, Hasan Tiro yang masih muda ketika itu ikut bergabung dengan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) yang ada di daerahnya. Pada 24 September 1945 di kibarkannya bendera merah putih oleh keluarga besar Tiro, serta membuat suatu bentuk pengakuan setia kepada Indonesia dan Hasan Tiro bersama dengan pamannya Teungku Umar Tiro mengucapkan ikrar kesetiaan itu kepada Indonesia dengan penuh khidmat.²⁹

Setelah pendidikan menengahnya selesai pada tahun 1945, karena kepintarannya dan berkat usaha Tgk. Muhammad Daud Beureueh yang memberikan rekomendasi kepada Perdana Menteri Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Syafruddin Prawiranegara, maka Hasan Tiro diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan selesai pada tahun 1949.³⁰

Pada tahun 1950, Hasan Tiro mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya dalam program master dan doktoral di Universitas Columbia Amerika Serikat, pada jurusan politik dan hukum internasional serta berhasil memperoleh gelar Ph.D dengan disertasi yang berjudul “Konstitusionalisme Kesultanan Aceh”.³¹ Di Amerika pula, sambil menyelesaikan kuliahnya ia bekerja pada Kementerian Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa. Setelah tamat dari bangku kuliah ia menikahi seorang perempuan keturunan Iran berkebangsaan Amerika yang bernama Dora, dan dari hasil pernikahannya itu ia dianugerahi seorang putera bernama Karim Tiro.

C. Pemikiran Politik Hasan Tiro

Menurut Hasan Tiro, kemakmuran dan kesejahteraan Aceh dapat diperoleh jika rakyat Aceh semua “sejajar-sebahu”, “seiring-selangkah” dan mau berpikir keras untuk saudara dan bangsa Aceh. Rakyat Aceh harus belajar kembali untuk memikirkan kedudukan “kepentingan Bangsa Aceh” dalam bidang politik, ekonomi, adab, dan hukum. Rakyat Aceh harus membuat pemikirannya sendiri sehingga bisa membangun Aceh, terutama generasi sekarang, dan yang akan datang. Inilah suatu jalan keluar untuk mencapai kemakmuran bukan dengan memikirkan kepentingan kelompok dan diri-sendiri. Dan yang utama adalah jangan pernah melupakan nasib rakyat Aceh.³²

Apapun yang dilakukan merupakan sebagai bentuk tanggung jawab sebuah bangsa, dalam hal ini “kepentingan bangsa Aceh”, menciptakan *Acehnese national interest* semua ini tidak bisa diwujudkan jika Aceh tidak merdeka. Apapun yang dilakukan sekarang harus meminta “izin” terlebih dahulu ke “orang seberang” (pemerintah pusat). Jika ingin menginvestasi uang dari Amerika atau Eropa ke Aceh, itu pun juga harus terlebih dahulu “meminta izin” kepada mereka. Dalam hal ini, sepertinya Aceh ini adalah tanahnya dan bangsa Aceh adalah budaknya. Begitu pun, “izin” tidak akan diberikan jika tidak ada

²⁹ Lihat: Osman Ralibi, *Kronika Historica Aceh*, (Jakarta: 1954), hal. 18.

³⁰ Munawar Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis, Yuridis ...*, hal. 11.

³¹ Lukman Thaib, *Aceh's Case: A Historical Study of ...*, hal. 259.

³² Hasan Tiro, *Aceh Di Mata Dunia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hal. 99.

keuntungan untuk bangsanya atau keuntungan tersebut dapat membuat kaya dan kuat kembali.³³

a. Kritik Terhadap Pancasila

Hasan Tiro menggambarkan bahwasanya pemberlakuan Pancasila sebagai falsafah atau ideologi negara merupakan sebuah pemaksaan terhadap warga negara, hal ini dikarenakan Pancasila tidak bersandar pada falsafah atau ideologi yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan rakyat Indonesia. Sebaliknya, Islam merupakan suatu falsafah, ideologi, dan agama yang hidup, berkembang, dan mengakar dalam masyarakat Indonesia. Sehingga selama mayoritas rakyat Indonesia yang beragamakan Islam masih mencapai 90%, maka untuk selama itu pula falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia akan tetap Islam.³⁴

Sejarah telah membuktikan bahwa Islam hampir saja menjadi dasar negara Indonesia, yang kala itu dibentuk tim Sembilan yang secara khusus membicarakan tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI, kesepakatannya disebut dengan Piagam Jakarta, dimana sila pertama berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945 sidang BPUPKI ini diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dan ide tersebut diterima secara aklamasi.³⁵

Tetapi kondisi politik nasional kala itu seketika berubah pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Tujuh kata yang menjadi dasar pemberlakuan syariat Islam di Indonesia berubah, dan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun sebenarnya peristiwa bersejarah tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bagaimana politik umat Islam sangat berjiwa besar demi kepentingan bangsa dan negara.³⁶

Hasan Tiro kecewa terhadap pemerintah Indonesia yang seharusnya tidak terjadi apabila pada saat kemerdekaan, Islam dijadikan sebagai falsafah atau ideologi Indonesia. Kekecewaan ini merupakan efek dari kekecewaan yang luar biasa dari kalangan ulama-ulama Aceh, perjuangan menegakkan Islam di tanah Aceh telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya ketika kerajaan samudra Pasai telah berada di bumi Darussalam sejak akhir abad ke-13 dan berkembang pesat pada abad ke-14. Sejak itu pula semangat Islam telah hadir di Aceh hingga saat ini.³⁷

Hal-hal yang dikemukakan oleh Soekarno dalam Pancasila sebagai falsafah negara, merupakan slogan semata yang menurut Hasan Tiro adalah Soekarno sendiri pun tidak mengetahui jalan mana yang akan ia pilih. Oleh karena itu, dalam falsafah “keadilan sosial” pada umumnya dapat diartikan sebagai sistem yang berbeda-beda dan bertentangan. Sehingga dengan menyebut keadilan sosial saja sebagai dasar negara dengan tidak menerangkan maksud pasti dari kata-kata tersebut, itu sama halnya dengan tidak mengatakan dan

³³ Hasan Tiro, *Aceh Di Mata ...*, hal. 101.

³⁴ Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, (Jakarta: Teplok Press, 1999), cet kedua, hal. 35.

³⁵ Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi*, (Jakarta: Kompas, 2011), hal. 95.

³⁶ Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku Menuju ...*, hal. 97.

³⁷ Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 10.

menjelaskan apapun. Dengan demikian, hal ini tidak bisa dikatakan dengan falsafah, tetapi tepatnya adalah ketidaksanggupan dalam berfikir.³⁸

Jelaslah kiranya bahwa Pancasila merupakan suatu bentuk dari kekacauan pemikiran yang tidak bisa diartikan sebagai suatu falsafah negara. Karena tidak dapat memberikan jawaban yang jelas dan tuntas terhadap suatu persoalan apapun, demikian juga halnya dengan Pancasila yang tidak dapat dikatakan sebagai ideologi negara karena tidak berisi muatan cita-cita atau keyakinan yang pasti. Pancasila lebih tepat jika diartikan sebagai kumpulan slogan-slogan, kendatipun demikian Pancasila tetap masih menjadi kumpulan slogan yang buruk, karena tidak jelas, tidak tegas, dan bermakna kabur. Maka Pancasila hanya pantas menjadi falsafah hidup bagi orang-orang yang merasakan kebingungan.³⁹

b. Nasionalisme Aceh

Menurut Hasan Tiro, ratusan tahun sebelum Indonesia terbentuk, Aceh telah menjadi sebuah entitas politik sendiri, yang bukan saja besar dan makmur, tetapi juga diakui oleh dunia internasional. Misalnya, tujuh tahun sebelum invasi pertama Belanda tahun 1873, *Larouse Grand Dictionaries Universelle* telah menggambarkan bahwa Aceh-Sumatera adalah suatu bangsa yang dominan di Indie. Informasi yang sama di tulis oleh *La Grande Encyclopedie* tahun 1874 juga menjelaskan kekuatan *Atchin* atau *Achem* yang dahsyat bertempur melawan serangan Portugis pada tahun 1582, dan bangsa Aceh tidak terkalahkan. Sementara Damste dalam bukunya *Het Volk van Atjeh* menurut Hasan Tiro juga menyatakan bahwa dari awal abad 17 perbatasan Aceh di Sumatera telah mencapai Selatan sampai Palembang dan Bengkulu dan di Semenanjung Malaya termasuk Perak, Kedah, dan Pahang.⁴⁰

Pengakuan akan keberadaan Negara Aceh juga terlihat di dalam sebuah traktat (perjanjian internasional) antara sultan Aceh dengan *Kim James I of Britanian* yang antara lain mengatakan harus ada suatu perdamaian abadi, persahabatan dan aliansi pertahanan di antara negara-negara berkuasa dan subjek-subjek para pihak yang terikat perjanjian tingkat tinggi, untuk tidak memberikan bantuan apa pun kepada musuh dari masing-masing pihak (ASNLF, *Acehnese History*). Selain itu hubungan baik juga dibangun dengan USA, Portugal, Perancis, Belanda, dan Turki. Dari penjelasan sejarah Aceh ini maka Hasan Tiro menyimpulkan bahwa Aceh lebih dulu ada ketimbang Indonesia, yakni satu bangsa bentukan/pulau (*a fabricated nation*) yang tak jelas asal-usulnya.⁴¹

Berdasarkan fakta-fakta sejarah ini, menurut Hasan Tiro, maka perjanjian penyerahan kedaulatan yang dihasilkan Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949 di Deh Haag, Belanda dimana semua bekas wilayah koloni Belanda termasuk Aceh menjadi wilayah Indonesia adalah suatu hal yang ilegal. Karena secara *de facto* maupun *de jure* Aceh tidak pernah takluk kepada Belanda, maka berdasarkan Resolusi PBB 1514-XV, tidak ada hak Belanda menyerahkan wilayah yang masih berdaulat atas dirinya, yakni Aceh kepada Indonesia.⁴²

³⁸ Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk ...*, hal. 78.

³⁹ Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk ...*, hal. 80-81.

⁴⁰ Hasan Tiro, *The Legal Status of Acheh-Sumatera Under International Law*, (Stockholm: ASNLF, 1980), hal. 1-2.

⁴¹ Hasan Tiro, *The Legal Status...*, hal. 7.

⁴² Taufan Damanik, *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi ...*, hal. 50.

Kedaulatan di dalam sebuah koloni atau di dalam sebuah wilayah *non-selfgoverning*, tidak terletak di tangan kekuasaan penjajah atau di tangan penguasa, tetapi berada di tangan rakyat jajahan atau wilayah itu (Resolusi PBB 1514-XV).⁴³ Berdasarkan resolusi tersebut semestinya semua kekuasaan haruslah dikembalikan oleh pemerintah penjajah kepada rakyat pribumi dari wilayah yang dimaksud. Bagi Hasan Tiro, pemindahan ilegal ini terjadi didasarkan atas kolusi antara kolonialis Belanda dengan kolonialis baru yaitu Indonesia dengan mengorbankan hak pengaturan diri sendiri rakyat Aceh-Sumatera.

Berangkat dari status hukum itulah Hasan Tiro beranggapan bahwa kekuasaan Indonesia atas Aceh sebagai sebuah invasi dari bangsa Indonesia atas bangsa Aceh. Hasan Tiro menginginkan upaya damai dengan cara Indonesia segera meninggalkan Aceh dan membiarkan rakyat Aceh menentukan nasibnya sendiri. Namun karena pendekatan damai ini tidak direspon dimana Indonesia justru masih menduduki serta membunuh rakyat Aceh, maka sebagaimana para pendahulu mereka yang telah bertempur dengan gagah berani menentang penjajahan Belanda, mereka pun akhirnya memilih perang terhadap penjajah Indonesia.

c. Gerakan Aceh Merdeka

Pemberontakan ini juga memiliki akar yang kuat di dalam perubahan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi begitu cepat di Aceh pada masa Orde Baru. Di satu sisi, eksplorasi sumber daya alam besar-besaran yang tidak berimbang kepada kesejahteraan rakyat Aceh, telah menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama di daerah pedesaan. Di sisi lain, sentralisasi dan penetrasi birokrasi sipil dan militer dari pusat terhadap Aceh telah mengeliminasi kekuatan-kekuatan politik lokal yang ada selama ini. Perasaan kecewa diperlukan pusat dan di tengah-tengah kekosongan kepemimpinan alternatif di Aceh, memberikan peluang kepada Hasan Tiro dan GAM untuk tampil mengartikulasikan identitas politik Aceh.⁴⁴ Dengan kata lain, dampak-dampak keterlepasan (*dislocatory effect*) telah menyebabkan identitas Aceh terhambat, dan sebaliknya karena itu pula mendorong nasionalisme atau identitas politik Aceh bisa menjadi wacana ideologi-politik yang hegemonik.⁴⁵

Kemakmuran dan kesejahteraan berawal dari sebuah kemerdekaan, jika Aceh tidak merdeka maka dikhawatirkan Aceh tidak akan makmur dan jauh dari nilai-nilai kesejahteraan. Kehidupan sebuah bangsa yang dijajah layaknya seperti kehidupan seorang budak. Sama halnya seperti harta benda yang dimiliki oleh seorang budak dirampas oleh majikannya. Begitu juga dengan harta yang dimiliki oleh sebuah bangsa serta hasil bumi yang dijajah oleh bangsa lain, maka akan dirampas olehnya.⁴⁶

Ketika Aceh dijajah oleh Belanda, hasil bumi dirampas oleh Belanda. Tetapi sekarang Aceh dijajah oleh orang “seberang lautan” dan hasil bumi dicurinya. Ketika dijajah oleh Belanda, ekonomi Aceh lebih baik daripada ketika dijajah oleh orang “seberang lautan”. Belanda lebih pintar mengatur ekonomi daripada orang “seberang lautan” yang masih

⁴³ Hasan Tiro, *The Legal Status ...*, hal. 8

⁴⁴ T. Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992*, (New York: Ithaca Cornell Modern Indonesia Project, 1995), hal. 83-85.

⁴⁵ Taufan Damanik, *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi ...*, hal. 34.

⁴⁶ Hasan Tiro, *Aceh Di Mata ...*, hal. 97.

terbelakang. Mengatur kawasannya saja tidak mampu, bagaimana mengatur Aceh. Oleh karena itu, kemakmuran Aceh tidak mungkin terwujud jika masih berada di bawah mereka.⁴⁷

Kemakmuran sebuah negara bukanlah sesuatu hal yang datang dengan sendirinya tanpa usaha yang kuat, kemakmuran itu ada jika pemerintahan merdeka. Mengatur yang dibutuhkan oleh rakyat tanpa ada yang melarang. Membuat perhitungan dan mampu melakukan yang terbaik untuk bangsa tanpa harus meminta izin kepada bangsa lain. Pemerintahan yang memiliki tujuan adalah yang mengerti bangsanya sendiri. Pemerintahan yang tidak dikendalikan oleh orang lain, dan tidak mempertanggungjawabkan ke “seberang lautan”.⁴⁸ Dengan demikian, untuk memperoleh kemakmuran terhadap Aceh maka dibentuklah sebuah front perjuangan oleh Hasan Tiro yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Gerakan Aceh Merdeka ini diproklamirkan oleh Hasan Tiro di Gunung Halimun Pidie, pada tanggal 4 Desember 1976, bersama dengan sejumlah tokoh lainnya yang pernah bergabung dengan DI/TII di bawah pimpinan Tgk. Daud Beureueh, seperti Tgk. Ilyas Leube, Hasan Saleh, Tgk. Daud Paneuk, Tgk. Saleh Adry, dan lain-lain. Sejak saat itu konflik politik dibarengi dengan konflik bersenjata yang intensitas dan eskalasinya cenderung meningkat dari waktu ke waktu.⁴⁹

Hasan tiro sendiri sempat merasakan perang gerilya di belantara hutan Aceh selama tiga tahun lamanya. Pada tanggal 29 Maret 1979, dari Kuala Jeunib, Aceh Utara, dengan menggunakan kapal mesin bernama Teruna berukuran 12 kaki x 6 kaki. Hasan Tiro mengarungi selat Malaka selama tujuh hari tujuh malam menuju Singapura. Setelah itu ia pun menggerakkan perjuangan dan Pemerintahan GAM dalam pengasingan dari Swedia. Sementara sepeninggalnya, pergerakan perjuangan terus berkobar. Kontak senjata secara gerilya maupun secara konvensional tidak henti-hentinya terus berlangsung.⁵⁰

Pada dasarnya, GAM merupakan kepanjangan dari perjuangan bangsa Aceh terdahulu, sejak masih dipimpin oleh Tgk. Daud Beureueh yang dikenal dengan Republik Islam Aceh (RIA). Oleh karena itu, dukungan yang sangat besar diberikan oleh para senior kepada Hasan Tiro dengan maksud dan tujuan untuk melanjutkan perjuangan mendirikan negara Islam di Aceh.⁵¹

Namun, sebagian pihak meyakini bahwa proklamasi kemerdekaan Aceh dilakukan setelah Hasan Tiro mendapatkan restu dari Daud Beureueh, tetapi El-Ibrahimi membantahnya. El-Ibrahimi mengatakan bahwa dalam dua kali kunjungannya, di mana Hasan Tiro menjelaskan gagasan kemerdekaan sepenuhnya untuk Aceh dari Indonesia ditanggapi dingin oleh Beureueh. Hal dikarenakan Hasan Tiro tidak mampu menjawab apa yang menjadi dasar bagi negara baru itu nantinya. Sebab bagi Beureueh, negara yang tidak berdasarkan Islam tidak bisa dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak. Tidak jelas

⁴⁷ Hasan Tiro, *Aceh Di Mata ...*, hal. 97.

⁴⁸ Hasan Tiro, *Aceh Di Mata ...*, hal. 97-98.

⁴⁹ Adam Mukhlis Arifin, *Demokrasi Aceh Mengubur Ideologi*, (Takengon: The Gayo Institute, 2011), hal. 13.

⁵⁰ Adam Mukhlis Arifin, *Demokrasi Aceh ...*, hal. 13-14.

⁵¹ Abu Jihad, *Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh*, (Jakarta: PT. Aksara Centra, 2000), hal. 35.

mana yang benar dari dua keterangan ini, walaupun faktanya Hasan Tiro mendapatkan dukungan dari para pengikut Beureueh.⁵²

Hal ini didorong oleh ketika perlawanan terhadap Belanda menjadi semakin kuat di Indonesia terutama pada masa revolusi kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1950, para ulama Aceh menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan nasional dalam skala yang lebih besar yang dipimpin oleh Soekarno. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh pada saat itu, perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan berada pada tingkatan yang sama dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dimana pada bulan oktober 1945, kaum ulama ditambah dengan dukungan dari masyarakat Aceh mendeklarasikan bahwa masyarakat Aceh bersatu dan tunduk di bawah pimpinan Soekarno. Mereka juga memaparkan perjuangan Indonesia sebagai kelanjutan dari perjuangan Aceh di masa lalu yang dipimpin oleh Tgk. Cik di Tiro, Cut Nyak Dien, dan Teuku Umar.⁵³

Setelah kemerdekaan tercapai, mulai muncul rasa ketidakpercayaan tersebar di Aceh. Setelah Republik Indonesia memegang kendali wilayah Aceh, pengaruh ekonomi dan politik dari kaum ulama mulai menurun. Pada saat itu, muncul pula kekecewaan dari beberapa elemen ulama terhadap Pemerintah Pusat. Sebelumnya, pada saat pertemuan dengan Gubernur Militer Aceh, Daud Beureueh, Presiden Soekarno menjanjikan penerapan syariat Islam di Aceh. Kegagalan dalam menepati janjinya telah menimbulkan rasa kekecewaan diantara masyarakat Aceh terutama pada kalangan ulama. Konflik yang terjadi antara Aceh dan Jakarta semakin memuncak pada tahun 1953, dimana Pemerintah Pusat menyatakan Aceh sebagai bagian dari kesatuan Indonesia. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Beureueh memproklamkan pembentukan Darul Islam (DI). Ia juga menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia yang dideklarasikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat beberapa tahun sebelumnya. Sejak saat itulah, aspirasi untuk kemerdekaan diantara masyarakat Aceh mulai berkembang.⁵⁴

Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro pada awalnya dapat dikatakan berada di bawah pengaruh Daud Beureueh, tetapi kemudian Gerakan Aceh Merdeka tersebut mulai menampakkan kematangannya dan mampu keluar dari pengaruh Daud Beureueh. Sehingga Hasan Tiro dapat memimpin Gerakan Aceh Merdeka dengan sangat leluasa untuk mewujudkan tujuan politiknya yaitu Aceh dapat memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Dengan demikian, Hasan Tiro menamai negaranya dengan sebutan *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) atau lebih dikenal dengan sebutan Front Pembebasan Aceh Sumatra. Penyebutan nama tersebut tidak lepas dari pengaruh gerakan yang serupa di Mindanao, Filipina. Ketika Nur Misuari saat itu mendirikan *Moro National Liberation Front* (MNLF), yang akhirnya mengalami perpecahan dan melahirkan *Moro Islamic Liberation*

⁵² Taufan Damanik, *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi ...*, hal. 53.

⁵³ Bob Sugeng Hadiwinata, "Aceh Pasca Konflik: Dinamika Penegakan Demokrasi", dalam *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka dari Kotak Peluru ke Kotak Suara Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombatan di Aceh*, ed., Linda Christanty, dkk., (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2010), hal. 118.

⁵⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, "Aceh Pasca Konflik ...", hal. 118-119.

Front (MILF).⁵⁵ Berdasarkan pemikiran Nasionalisme Aceh yang dikemukakan oleh Hasan Tiro yang kemudian dikenal luas sebagai ideologinya, maka ia lebih tertarik menamakan gerakannya tersebut dengan ASNLF. Hal ini dipicu oleh sejarah bangsa Aceh yang berkedaulatan, yang dimulai dari sejak zaman kerajaan Samudra Pasai⁵⁶ hingga pada akhirnya bersatu bersama Indonesia.

Hasan Tiro kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan sebutan *wali Nanggroe*. Gerakan Aceh Merdeka ini dirancang untuk menjadikan sebuah gerakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap Aceh. Semula di awal-awal pembentukan pergerakan perlawanan tersebut ditujukan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip agama Islam. Tetapi kemudian nilai-nilai keagamaan itu telah diperbaharui dengan tujuan untuk memodernkan pola-pola perjuangan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi politik pada saat itu. Hal tersebut didasari oleh sulitnya mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional jika nilai-nilai keagamaan lebih ditonjolkan dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Berbeda dengan pendahulunya Tgk. Daud Beureueh, Hasan Tiro berlatar belakang pendidikan modern yang kemudian membangun GAM dengan pola organisasi yang lebih tertib dan disiplin. Pola rekrutmen diperketat⁵⁷, strategi dan taktik gerilya yang modern, ditambah dengan doktrinasi terhadap pasukan militer dan platform tempur yang dirancang secara modern pula, serta kepemimpinan yang sangat sentralistik dalam struktur GAM. Ada dua hal yang menarik dari Hasan Tiro, *pertama*, ia membagi GAM dalam dua struktur, yaitu GAM sebagai kekuatan politik negara yang dipimpinnya sendiri secara langsung sebagai *Wali Nanggroe*. Dalam hal ini, perjuangan politik Aceh sebagai “negara” dikontrol melalui struktur pemerintahan sipil yang dikendalikan dari Swedia. *Kedua*, GAM sebagai kekuatan militer yang disebut dengan TNA (*teuntra nanggroe Aceh*) yang dipimpin oleh seorang panglima perang dengan sistem komando militer modern. TNA mendapatkan kepercayaan penuh dalam melakukan operasi pertempuran di Aceh, akan tetapi keputusan-keputusan politik hanya bisa dilakukan oleh *Wali Nanggroe* di Swedia.⁵⁸

Strategi dan taktik seperti ini mampu memberikan energi perjuangan yang sangat besar terhadap GAM, kemungkinan terjadinya pembelotan ataupun pengkhianatan pasukan sangat minim terjadi, walaupun ada tidak akan mempengaruhi posisi politik GAM. Kepemimpinan yang sangat sentralistik membuat pasukan GAM tidak mudah dipukul mundur hanya dengan menangkap atau membunuh pimpinan pasukannya, sebagaimana terjadi pada DI/TII di bawah Tgk. Daud Beureueh. Dalam beberapa insiden penembakan terhadap panglima GAM, hal ini tidak mempengaruhi struktur pasukan secara keseluruhan. Keputusan politik yang

⁵⁵ Muhammad Madya Akbar, *Aceh Meretas Jalan Damai Menuju Masa Depan*, (Jakarta: Publisher Lentera Demokrasi, 2009), hal. 54.

⁵⁶ Pada Abad ke 11 dan menjelang abad ke 13, kerajaan-pelabuhan terbesar adalah Samudera (kemudian Pasai). Pada abad ke 14 kerajaan Samudera berkembang pesat sehingga namanya digunakan untuk penamaan seluruh pulau Sumatra. Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh ...*, hal. 1.

⁵⁷ Perekrutan anggota dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan para anggota GAM yang lebih dulu telah bergabung, serta dilakukannya dengan pendekatan semangat keagamaan, dan sejarah kehebatan Aceh di masa lalu.

⁵⁸ Saiful Haq, “Epilog: Seulawah di Ujung Barat Republik”, dalam *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka ...*, hal. 224-225.

dikendalikan dari Swedia membuat pemerintah Republik Indonesia kesulitan dalam menghancurkan kekuatan politik GAM, kemungkinan tindakan-tindakan yang bersifat infiltrasi menjadi tidak berarti karena pasukan GAM di Aceh tidak berhak mengambil keputusan yang bersifat politik.⁵⁹

Disamping itu, GAM tidak saja memprioritaskan pergerakannya pada bidang militer saja, melainkan adanya upaya-upaya peningkatan intelektualisme para anggotanya, hal ini dapat dilihat dari adanya Universitas Aceh yang didirikan oleh Hasan Tiro di Bukit Halimun, Pidie. Perkuliahan itu diikuti oleh 10 persen dokter, 10 persen insinyur, 15 persen ahli hukum, 40 persen guru, serta 5 persen petani dan nelayan. Pendekatan utama GAM tidak hanya mengenai berperang atau mengenai militer saja, tetapi juga gagasan politik.⁶⁰

Pada perkembangan selanjutnya dalam menjalankan roda organisasi, GAM tidak hanya melibatkan orang pintar saja, melainkan juga melibatkan orang awam. Menurut Hasan Tiro, Aceh mampu merdeka dengan enam orang buta huruf saja, karena untuk sebuah perjuangan tidak dibutuhkan orang yang pintar tentang politik, ekonomi, hukum, dan agama. Akan tetapi, yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan adalah orang-orang yang siap menjalankan perintah atasan.⁶¹

Sedangkan karakteristik GAM dalam melakukan perang gerilya yaitu dari hutan ke hutan, desa ke desa, sampai kota ke kota. Langkah ini diambil karena menurut GAM gerilya seperti ini dapat merepotkan tentara pemerintah Indonesia dalam menumpas pergerakan ini. Serta ditambah dengan dukungan dari masyarakat sebagai benteng terakhir yang menjadikan pertahanan utama bagi keberlangsungan pergerakan GAM. Dengan demikian, GAM mampu bertahan dan pergerakan perjuangannya eksis sampai beberapa puluh tahun kemudian.

KESIMPULAN

Hasan Tiro merupakan seorang tokoh pejuang politik Aceh yang konsisten dengan gagasannya yaitu tentang kemerdekaan Aceh. Ia berangkat dari suatu persepsi kebesaran sejarah Aceh dari masa kesultanan Aceh yang dikontekstualisasikan dengan anggapan bahwa Aceh adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak mampu ditaklukkan oleh penjajahan manapun terutama penjajahan Belanda. Sehingga menurutnya pemerintah Indonesia telah mengambil dan merampas kedaulatan Aceh dari tangan rakyat Aceh. Oleh karena itu, Hasan Tiro berkeinginan untuk merebut kembali kedaulatan Aceh tersebut dari pemerintah Indonesia melalui pemikiran, gagasan, dan tindakannya.

Hasan Tiro termasuk tokoh pejuang politik yang menemukan dan membangkitkan kembali harkat dan martabat bangsa Aceh terhadap pemerintah Indonesia, serta ia turut pula mengkonsepsikan jati diri bangsa Aceh melalui ide dan gagasannya yaitu nasionalisme Aceh. Hal inilah kemudian yang menjadi kunci utama keberhasilannya dalam merancang dan

⁵⁹ Saiful Haq, "Epilog: Seulawah di Ujung ...", hal. 225.

⁶⁰ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hal. 73.

⁶¹ Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka*, (Jakarta: Titian Ilmu Insani, 2000), hal. 62.

mengatur sebuah organisasi militan modern seperti GAM yang ia proklamirkan pada tahun 1976.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap tujuan pendirian negara Aceh merdeka, usaha dan keyakinannya terhadap apa yang telah ia cita-citakan sangatlah besar manfaat dan maknanya bagi kelangsungan kehidupan politik bangsa Aceh hari ini dan untuk dikemudian hari. Sehingga upaya perjuangan dari seorang Hasan Tiro tersebut paling tidak telah menentanghkan kepada rakyat Aceh tentang bagaimana karakteristik rakyat Aceh yang sesungguhnya, khususnya dalam hal perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa Aceh. Karena bagaimana pun ia telah menemukan dan menegakkan identitas rakyat serta bangsa Aceh dan ikut memperkenalkannya kepada khalayak dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusra Habib Abdul Ghani, *Mengapa Sumatera Menggugat*, Jakarta: Biro Penerangan Aceh-Sumatera National Liberation Front, 2000.
- Munawar Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis Yuridis dan Realitas Sosial*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009.
- Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008.
- A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI, 2003.
- Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, Banda Aceh: Penerbit Pena, 2014.
- Abu Jihad, *Pemikiran-Pemikiran Politik Hasan Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka*, Titian Ilmu Insani, 2000.
- Asvi Warman Adam, “Konflik dan Penyelesaian Aceh: Dari Masa ke Masa”, dalam *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*, ed., M. Hamdan Basyar, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008.
- M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Jakarta: FES, 2010.
- Muhammad Madya Akbar, *Aceh Meretas Jalan Damai Menuju Masa Depan*, Jakarta: Publisher Lentera Demokrasi, 2009.
- Nezar Patria, “Obituari: Perginya Sang ‘Wali’ Terakhir”, dalam *Hasan Tiro The Unfinished Story of Aceh*, (Peny.), Husaini Nurdin, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010.

- Hasan Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro*, ASNLF, 1984.
- Lukman Thaib, *Aceh's Case: A Historical Study of The National Movement for The Independence of Aceh-Sumatera*, Malaysia: University of Malaya Press, 2002.
- H.C. Zentgraaff, *Atjeh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982.
- Osman Ralibi, *Kronica Historica Aceh*, Jakarta: 1954.
- Hasan Tiro, *Aceh Di Mata Dunia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
- Hasan Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Teplok Press, 1999.
- Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Kompas, 2011.
- Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Hasan Tiro, *The Legal Status of Acheh-Sumatera Under International Law*, Stockholm: ASNLF, 1980.
- T. Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992*, New York: Ithaca Cornell Modern Indonesia Project, 1995.
- Adam Mukhlis Arifin, *Demokrasi Aceh Mengubur Ideologi*, Takengon: The Gayo Institute, 2011.
- Abu Jihad, *Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh*, Jakarta: PT. Aksara Centra, 2000.
- Bob Sugeng Hadiwinata, "Aceh Pasca Konflik: Dinamika Penegakan Demokrasi", dalam *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka dari Kotak Peluru ke Kotak Suara Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombat di Aceh*, ed., Linda Christanty, dkk., Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2010.
- Muhammad Madya Akbar, *Aceh Meretas Jalan Damai Menuju Masa Depan*, Jakarta: Publisher Lentera Demokrasi, 2009.
- Saiful Haq, "Epilog: Seulawah di Ujung Barat Republik", dalam *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka dari Kotak Peluru ke Kotak Suara Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombat di Aceh*, ed., Linda Christanty, dkk., Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2010.
- Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.